



ATASI KELANGKAAN MINYAK GORENG Perlu Pemerataan Distribusi

YOGYA (KR) - Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran telah menimbulkan terjadinya 'panic buying' di masyarakat. Bahkan kondisi tersebut telah mempengaruhi psikologi masyarakat. Karena kepanikan itu tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha atau pemilik usaha kuliner tapi juga kalangan rumah tangga. Dampaknya mereka yang biasa belanja 2 liter pasti akan menyimpan stok lebih banyak, misalnya menjadi 4 liter. Semua itu terpaksa dilakukan karena takut di hari mendatang semakin langka.

"Menyikapi hal itu, pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan dan aparaturnya, perlu lebih memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran. Jangan sampai nanti saat dari pabrik sudah didistribusikan, ternyata tidak sampai ke toko dan supermarket yang berdampak pada terjadinya kelangkaan," kata pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana



KR-Riyana Ekawati

Widarta MM

Yogyakarta (UMBY), Widarta MM di Yogyakarta, Minggu (20/2).

Widarta mengatakan, terbatasnya stok minyak goreng maupun pasar tradisional sedikit banyak akan berdampak pada perilaku konsumen. Apalagi dengan adanya berita di sejumlah media yang beberapa waktu lalu, menulis tentang tertangkapnya penimbun minyak goreng 1,1 juta liter di salah satu daerah.

Kondisi itu akan berdampak pada keinginan masyarakat untuk memburu minyak goreng makin tinggi.

"Kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan harga minyak goreng satu liternya sebesar Rp 14.000 baik di retail lokal, nasional, atau pasar tradisional, ternyata tidak sepenuhnya bisa meredam kenaikan harga. Sebaliknya adanya kebijakan itu tanpa disadari, justru berdampak pada harga komoditas lain. Sehingga perlu pengawasan dari pemerintah untuk lebih menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi," papar dosen Fakultas Ekonomi UMBY tersebut.

Menurutnya, harusnya pemerintah memastikan stok minyak goreng di pasaran. Tentunya stok disini bukan hanya stok minyak goreng kemasan, namun juga minyak goreng curah. Pasalnya jika kondisinya masih seperti sekarang dikhawatirkan adanya polemik soal minyak goreng bisa berkepanjangan. Supaya hal itu tidak terjadi pemerintah dengan dukungan pihak-pihak terkait perlu segera mencari solusi terbaik. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005